



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional yang sistematis dan berkesinambungan, sebagai implementasi undang-undang tersebut hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di Kota Balikpapan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan melaksanakan pengoordinasian pelayanan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada satu tempat maupun satu pintu serta melakukan promosi dan pengembangan investasi di daerah, telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RK-PD) sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang menjadi prioritas (terutama berasal dari masyarakat) dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akuntabilitas perencanaan kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai salah satu upaya untuk memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya *Good Government* dan *Clean Governance*.

Balikpapan, 14 Juli 2025

Kepala DPMPTSP
Kota Balikpapan



HASBULLAH HELMI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPSTSP Tahun 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPSTSP Tahun 2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPSTSP	45
3.3 Program dan Kegiatan	50
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPSTSP Kota Balikpapan	65
Bab V Inovasi Perangkat Daerah	72
Bab VI Penutup	73

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2024	15
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	26
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026	32
Tabel T-C.32	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
Tabel 3.1	Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan.....	45
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPT Tahun 2026.....	48
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	53

BAB I

PENDAHULUAN

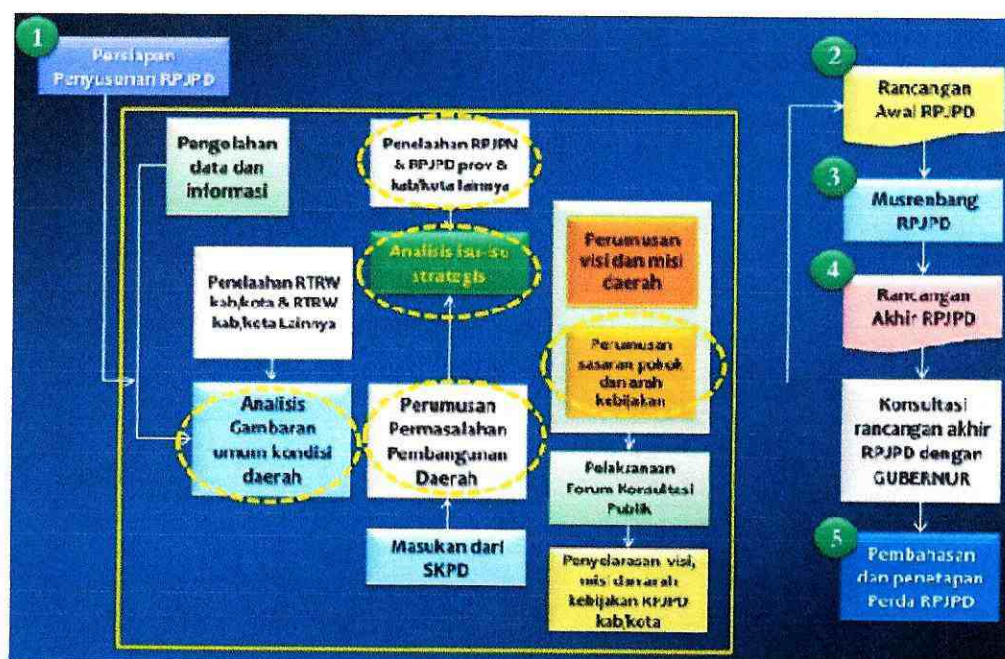
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja erangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang ipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara teknis, penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dari Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 DPMPTSP Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT);

14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Balikpapan menjalankan 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian target, tujuan dan sasaran dinas pada tahun berjalan sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2021-2026. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 (Murni) sebesar **Rp 18.477.260.462,-** (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dan berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024, ditetapkan tanggal 24 September 2024, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024, ditetapkan tanggal 24 September 2024, diundangkan 27 September 2024, Pagu Anggaran Perubahan DMPTSP Kota Balikpapan menjadi sebesar **Rp 17.420.283.497,-** (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Perubahan dilakukan untuk melakukan efisiensi/pemotongan anggaran sesuai kebutuhan.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dari Rp 9.807.133.965 menjadi Rp 8.750.157.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 472.938.400 menjadi Rp 49.681.000
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Rp 541.944.400 menjadi Rp 588.844.400
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu dari Rp 80.400.000 menjadi Rp 33.500.000

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp 470.000.000 menjadi Rp 612.245.088
6. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 591.240.900 menjadi Rp 575.454.900
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari Rp 1.976.441.500 menjadi Rp 2.031.441.500
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Rp 184.311.300 menjadi Rp 274.163.612
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari Rp 99.946.000 menjadi Rp 199.892.000
10. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan pagu semula Rp 174.318.000 menjadi Rp 226.318.000.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan s/d Tahun 2024, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 - 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2024 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **93,58 %** dengan Realisasi Keuangan DPMPTSP sebesar **88,17 %** (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,51%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,36%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,13%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 104% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 93,85%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 96,98%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,12%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 56,24%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

10. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,26%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

11. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 99,07%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

12. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

13. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 221% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

14. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 130% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 88,02%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

15. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 144% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 101% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,56%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 225% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 94,26%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

18. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel pada Rencana Kerja ini.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	90 693,674,000	95 662,922,382	106% 95.57%	Jumlah pengunjung dalam kegiatan promosi penanaman modal tahun 2024 melampaui target dikarenakan daya tarik calon investor akibat penetapan Balikpapan sebagai mitra IKN, dan berdampak peningkatan pada ketertarikan pengunjung untuk investasi dan pariwisata
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kenalkan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	5 693,674,000	4 662,922,382	80% 95.57%	Terdapat penurunan jumlah kegiatan promosi dikarenakan event ALKI II Zone Investment Forum dilaksanakan per 2 tahun sekali, namun untuk kegiatan expo rutin dari tahun 2023 s.d 2025 tetap sama targetnya 5 kali expo
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5 530,998,000	5 522,673,539	100% 98.43%	Event Promosi telah terlaksana dilaksanakan pada event ICE APEKSI 2024 (Balikpapan), PPUN Expo (Jogja), dan Indonesia International Smart City Expo & Forum (ISMEX) (Jakarta), Trade Expo Internasional (TE) di BSD Tangerang semua terealisasi sesuai target.
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1 162,676,000	1 140,248,843,20	100% 86.21%	Telah selesai dilaksanakan penyusunan NA Strategi Promosi pada tanggal 5 September 2024 dan telah dicetak dalam bentuk buku

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	5 185,250,000	0 135,385,700	0% 73.08%	Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda (masih menunggu pengesahan biro hukum provinsi) dan Perwali (masih berupa draf)
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	%	20 100,000,000	20 54,390,700	100% 54.39%	Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota (Perwa) Tentang Tata Cara Pemberian Insentif investasi telah selesai pada akhir November 2024, namun dalam penetapannya menjadi Peraturan Wali Kota (Perwal) masih menunggu Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) oleh Biro Hukum Provinsi Kaltim.
		Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1 100,000,000	1 54,390,700	100% 54.39%	Telah Terlaksananya Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Tata Cara Pemberian Insentif investasi, yang selesai pada akhir November 2024, namun dalam menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) masih menunggu Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) oleh Biro Hukum Provinsi Kaltim.
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	20 85,250,000	20 80,995,000	100% 95.01%	telah selesai dilaksanakan updating Peta Potensi investasi Kota Balikpapan pada 8 Agustus 2024
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1 85,250,000	1 80,995,000	100% 95.01%	telah selesai dilaksanakan updating Peta Potensi investasi Kota Balikpapan pada 8 Agustus 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	3	4	5	7	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	17			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (%)	%	100	1,239,202,000	100	991,091,171	100%	79.98%	Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 19 Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (66 Kegiatan Usaha).
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM (LKPM)	LKPM	330	1,239,202,000	7998	991,091,171	2,423.64	79.98%	Jumlah Penyampaian LKPM sudah tercapai sebesar 2.423,64 % disebabkan oleh Terlaksananya kegiatan LKPM Hunter serta sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha di Kota Balikpapan
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	20	226,318,000	66	157,088,513	330%	69.41%	Kegiatan Penyelesaian Masalah (Fasilitasi) sudah melebihi target yaitu 66 Kegiatan Usaha, dari target 20 Kegiatan Usaha (330 %).
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	560	662,384,000	645	606,182,858	115%	91.52%	Realisasi kegiatan telah diselesaikan pada triwulan 3 tahun 2024, realisasi tercapai diatas 100% karena terdapat dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sehingga kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi dapat dimaksimalkan pelaksanaannya
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kematuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	38	350,500,000	44	227,819,800	116%	65.00%	Capaian realisasi lebih dari 100% Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sudah melebihi target yaitu 44 Kegiatan Usaha hal ini dapat tercapai Karena kinerja yang maksimal dari Tim Datalak dan dukungan dari Kadis serta Tim lain yang terlibat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	86 462,913,533	96 426,498,550	111,63% 92%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penneblian izin via oss.go.id. Data dilirik per triwulan untuk mencegah kehilangan data
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi	%	100 462,913,533	100 426,498,550	100% 92%	Rasio data capaian mencapai 100% Bahwa seluruh permintaan data yang diajukan telah dipenuhi (Laporan dibuat per tahunan)	
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1 462,913,533	1 426,498,550	100% 92%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	69	97,53	141%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id dan non OSS
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	11600	15.405	812,142,143	133%
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.500	5.155	344%	Data didapatkan dari seluruh pelayanan pada PTSP I dan PTSP II
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	10.000	13.678	137%	Data diambil dari seluruh layanan baik offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan Sijempol). Terlaksana 37 kegiatan Sijempol sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024
		Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	100	176	176%	Dilakukan berdasarkan peninjauan baik secara langsung maupun proses verifikasi izin via OSS dari bidang bidang

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan			
III	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	80	15,039,464,955	94.32	12,331,324,098	117.90%	88.58%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan internal
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor	79	8,750,157,000	95.68	7,718,407,846	121%	88.21%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan administrasi keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	8,750,157,000	41	7,718,407,846	100%	88.21%	Sesuai update data pada aplikasi SimGAJI (sesuai update data sejumlah 41 orang PNS)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor	78.5	1,403,242,588	90.26	1,267,489,993	115%	93.33%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan administrasi umum
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	43,973,100	1	39,362,480	100%	90%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	49,681,000	3	46,830,000	100%	94.26%	Terdapat efisiensi anggaran pada internal DPMPPTSP pada tahapan APBD-P, anggaran penyediaan paket peralatan ditihkan untuk sub kegiatan yang lebih urgent
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	588,844,400	4	514,418,300	100%	87.36%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	74,999,000	3	59,735,000	100%	79.65%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	33,500,000	1	32,538,000	100%	97.13%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	612,245,088	69	574,606,213	106.15%	93.85%	Melebihi target 100% dikarenakan terdapat penambahan anggaran pada tahapan APBD-P, memaksimalkan dari efisiensi anggaran pada internal DPMPPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Stor	80 2,577,682,400	96.37 2,496,606,390	120.46% 96.85%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan jasa penunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 10,000,000	1 6,250,000	100% 62.50%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 575,454,900	4 558,076,530	100% 96.98%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 2,031,441,500	3 1,932,279,860	100% 95.12%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Penjelasan	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	79 960,758,864	94.71 848,819,869	88.35%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24 676,501,564	24 448,668,240	66.32%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8 274,163,162	6 203,137,500	74.09%	Total tercapai 6 dari 8 jenis belum tercapai karena terdapat efisiensi anggaran internal, anggaran dialihkan untuk pemeliharaan gedung kantor yang lebih urgent	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 199,892,000	1 197,014,129	98.56%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
TOTAL						18,529,260,462	175.25	85.59	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN							125.98%	85.52%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN							Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN							341.03%	85.32%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN							Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							96.01%	86.3%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							Sangat Tinggi	Tinggi	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja 0% dan capaian keuangan 73,08% dengan target indikator program yaitu Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal dengan target kinerja sebesar 5% namun realisasi kinerja pada tahun 2024 belum tercapai (0%) karena Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda (masih menunggu pengesahan biro hukum provinsi) dan Perwali (masih berupa draf)

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 79,98% dengan target indikator program yaitu Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 19 Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (66 Kegiatan Usaha).

4. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- **Program Promosi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 106% dan capaian keuangan 95.57% dengan target indikator program yaitu Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dengan target kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 95% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 106% karena Jumlah pengunjung dalam kegiatan promosi penanaman modal tahun 2024 melampaui target dikarenakan daya tarik calon investor akibat penetapan Balikpapan sebagai mitra IKN, dan berdampak peningkatan pada ketertarikan pengunjung untuk investasi dan pariwisata.
- **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 109,16% dan capaian keuangan 92% dengan target indikator program yaitu Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif dengan target kinerja sebesar 86% dan terealisasi sebesar 93,88% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 109,16% karena Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id, Data ditarik per triwulan untuk mencegah kehilangan data
- **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 141% dan capaian keuangan 88% dengan target indikator program yaitu Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target kinerja sebesar 69% dan terealisasi sebesar 97,53% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 141% dengan jumlah penerbitan sejumlah 15.405 dokumen jika dibandingkan dengan target jumlah penerbitan Perizinan sebesar 11.600 dokumen
- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan tingkat capaian kinerja 117,90% dan capaian keuangan 82,05% dengan target indikator program yaitu IKM Internal Perangkat Daerah dengan

target kinerja Skor IKM sebesar 80,00 dan terealisasi sebesar 94,32 sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 117,90% dengan hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas tercapai cukup baik.

5. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

- Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

6. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;
- Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;
- Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;

- Komitmen bersama seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Sesuai dengan .Adapun capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel T-C .30 di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian / PROYEKSI			Catatan Analisis
			Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2026	Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2026	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	100%	100%	100%	156,39%	128,02%	Sesuai Target Renstra	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	75	75,5	75,6	98,55%	99,76%		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	0,11%	0,11%	1827%	354,55%		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPMPSTSP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Indikator I “Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi”**, dengan realisasi sebesar **128,02 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **128,02 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator II “Nilai SAKIP DPMPSTSP Kota Balikpapan”** , dengan realisasi sebesar 75,32 dari target 75,50 sehingga capaian sebesar **99,76%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator III “Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat”** , dengan realisasi sebesar 0,39 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **354,55%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DPMPSTSP

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPSTSP kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPSTSP Kota Balikpapan pada tahun 2026 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang telah diresmikan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta dan pada pengembangannya akan di *upgrade* menjadi Mal Pelayanan Publik Digital;
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan

melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPTSP Kota Balikpapan adalah sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan);

3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;
7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPTSP sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;
9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);

2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;
5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;
8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPTSP melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b diatas, DPMPTSP memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPTSP memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk

mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan transparansi biaya pengelolaan izin.

- **Tracking Barcode dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.
- **SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online tanpa antrian)**
Inovasi SPONTAN aplikasi untuk pemenuhan komitmen dimasa pandemic. Pengajuan dan penerbitan izin bisa didownload langsung via email pemohon.
- **SIBER (sistem Antar Izin Terbit)**
Inovasi SIBER (sistem antar izin terbit) yang dibuat untuk izin yang tidak terbit sesuai SOP dan bekerjasama dengan Ojek Online untuk pengantaran berkasnya.
- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**
Merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPTSP langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.
- **Simpananku Kopi**
Merupakan layanan Memudahkan difabel dan manula dalam mengajukan perizinan berusaha dimasa pandemic.izin bisa dijemput dan diantar.
- **Mimbari Online**
Merupakan layanan untuk mempermudah pengelolaan IMB rumah ibadah lebih cepat dan mudah terbit tanpa retribusi
- Kualitas SDM DPMPTSP yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan beserta evaluasinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 DPMPSTP Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Balikpapan	Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	5%	275,000,000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Balikpapan	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	215,000,000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	20%	275,000,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	100%	215,000,000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	200,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	140,000,000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	75,000,000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Promosi Penanaman Modal	Balikpapan	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	100%	1,326,787,971	Program Promosi Penanaman Modal	Balikpapan	Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi	15.21%	912,392,310	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal	5%	1,326,787,971	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah investor yang berinvestasi	13088	912,392,310	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6	1,326,787,971	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	912,392,310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya	100%	374,803,000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya	100%	343,303,000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Penyampaian LKPM	360 LKPM	374,803,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Penyampaian LKPM	360 LKPM	343,303,000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Balikpapan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	110,248,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Balikpapan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	110,248,000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	185,000,000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	153,500,000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	79,555,000	Pengawasan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	79,555,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Balikpapan	Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	70	1,590,327,428	Program Pelayanan Penanaman Modal	Balikpapan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97.82	1,011,450,379	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	11610	1,590,327,428	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	18291	1,011,450,379	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	1,203,260,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13153	753,302,700	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	10000	151,902,743	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	8000	106,198,727	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	110	235,164,685	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	110	151,948,952	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3 Balikpapan	4 Presentase data dan informasi perizinan yang berlaku efektif	5 88	6 578,000,000	7 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8 Balikpapan	9 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	5 100	6 423,803,000	12
	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Balikpapan	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100	578,000,000	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Balikpapan	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100	423,803,000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	578,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	423,803,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	82	19,012,008,733	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	94.57	15,843,690,311	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	78	142,571,970	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.05	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	142,571,970	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah	81	12,759,061,097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.68	10,287,036,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	12,759,061,097	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	10,287,036,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81	1,611,549,707	Administrasi Umum Perangkat daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.39	1,435,822,687	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	59,994,690	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	59,994,690	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	76,408,953	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	76,408,953	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	621,363,865	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	553,999,755	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	99,995,270	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	99,995,270	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	80,383,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	80,383,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	673,403,929	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	565,041,019	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81	249,600,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.39	249,600,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	249,600,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	249,600,000	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81	2,811,096,615	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.5	2,523,586,360	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	727,177,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	650,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	2,073,918,815	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1,868,586,360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.5	1,438,129,344	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.71	1,347,645,264	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	822,677,164	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	822,677,164	
	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	364,968,100	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94	364,968,100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	250,484,080	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	160,000,000	
TOTAL					23,156,927,132					18,749,639,000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) tahun 2026 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPTSP berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: DPMPTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah dokumen perencanaan nasional yang menjadi dasar pembangunan Indonesia selama 20 tahun, dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 adalah bagian dari penjabaran operasional dari RPJPN dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RKP 2026 memiliki tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan domestik dan memastikan pembangunan yang berdampak bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting terkait RPJPN 2025-2045 dan RKP 2026:

RPJPN 2025-2045:

- Bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
- Menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan nasional selama 20 tahun.
- Visi ini diterjemahkan dari kekuatan modal dasar Indonesia, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.
- "Berkelanjutan" dalam RPJPN mencakup pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RKP 2026:

- Merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBN 2026.
- Mengusung tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".
- Fokus pada delapan Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

- Prioritas Nasional tahun 2026 meliputi kedaulatan pangan dan energi, optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan, peningkatan bauran energi, pengembangan SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8% hingga 6,3%.
- RKP 2026 juga mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau melalui penyesuaian kebijakan ekonomi hijau dan lingkungan hidup.

Rancangan Akhir RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 memiliki dua klaster prioritas nasional: **kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif**. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai prioritas dan program tersebut:

I. Klaster Kedaulatan Pangan dan Energi:

- A. Optimalisasi Bulog:** Peningkatan peran Badan Urusan Logistik dalam pengelolaan dan distribusi pangan.
- B. Food Estate:** Pelaksanaan proyek lumbung pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
- C. Peningkatan Energi Terbarukan:** Peningkatan penggunaan energi terbarukan, termasuk peningkatan bauran etanol dan biodiesel.
- D. Pengembangan SPAM Terintegrasi:** Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu hingga hilir.
- E. Pengelolaan Sampah:** Peningkatan pengelolaan sampah untuk mendukung kelestarian lingkungan.

II. Klaster Ekonomi Produktif dan Inklusif:

A. Pendidikan:

- **MBG:** Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah.
- **Percepatan Renovasi Sekolah:** Perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
- **Sekolah Unggulan:** Peningkatan kualitas sekolah-sekolah terpilih.
- **Digitalisasi Pendidikan:** Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.
- **Sekolah Rakyat:** Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

B. Kesehatan:

- **Cek Kesehatan:** Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat.
- **Percepatan Rumah Sakit Daerah:** Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan di daerah.

C. Deregulasi dan Kepastian Hukum: Mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

D. Pertahanan Semesta: Penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara.

E. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:

- **Hilirisasi Sumber Daya Alam:** Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam melalui proses hilirisasi.
- **Adopsi Teknologi dan Inovasi:** Penerapan teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- **Percepatan Pengentasan Kemiskinan:** Program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah dan program pemberdayaan masyarakat.

F. Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi: Pengelolaan keuangan negara yang adaptif dan menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam Rancangan Akhir RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 yang memiliki dua kluster prioritas nasional diatas, program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Balikpapan mengacu pada **Kluster Ekonomi Produktif dan Inklusif pada sektor Deregulasi dan Kepastian Hukum yaitu “mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif”**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan. Meskipun DPMPTSP bukan bagian dari kementerian, namun memiliki hubungan kerja dengan kementerian terkait, terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan. Salah satunya adalah dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Berikut disajikan telaahan Misi BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan :

Tabel 3.1

Telaahan Misi BKPM dan DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1 Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Meningkatkan nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	3 Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi	2 Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	4 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPPTSP Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPPTSP

Pendekatan Penyusunan RKP 2026 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Priority Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan

- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2054 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik <p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026, Program dan Kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan:

- a. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;
- b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka terdapat jumlah program sejumlah 6 program, 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Pagu Indikatif Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
I	Bidang Penanaman Modal										
A	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi			100%	2,905,948,689					4,352,164,319
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan			100%	215,000,000					288,750,000
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Outcome (Hasil): Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 140,000,000 1 12 1 100%	140,000,000	APBD			1	210,000,000
	2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Input 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Outcome (Hasil): Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 75,000,000 1 12 1 100%	75,000,000	APBD			1	78,750,000

No	Usrah/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
II	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi			15.21%	912,392,310	APBD		100%	1,393,127,370
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi			13088	912,392,310	APBD		5%	1,393,127,370
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp event bulan	5 6 912,392,310 5 12	912,392,310	APBD		6	1,393,127,370
			Output (Keluaran): Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5					
			Outcome (Hasil): Jumlah investor yang berinvestasi	Persen	13088					
III	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya			100%	343,303,000	APBD		100%	393,543,150
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyampaian LKPM			360 LKPM	343,303,000	APBD		360 LKPM	393,543,150
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu	Orang Rp Paket Bulan	4 6 110,248,000 1 12	110,248,000	APBD		4	115,760,400
			Output (Keluaran): Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4					
			Outcome (Hasil): Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	360 LKPM					

No	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
	2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Outcome (Hasil): Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha LKPM	150 6 153.500,000 1 12 150 360 LKPM	153.500,000	APBD	150	194,250,000
	3. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Outcome (Hasil): Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha LKPM	16 6 79,555,000 1 12 16 360 LKPM	79,555,000	APBD	16	83,532,750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan			97.82	1,011,450,379	APBD		70	1,669,843,799
A	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan			18291	1,011,450,379	APBD		11610	1,669,843,799
	1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Outcome (Hasil): Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Orang Rp Paket Bulan	13153 21 753,302,700 1 12	753,302,700	APBD	1500		1,263,423,000
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Outcome (Hasil): Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Orang Rp. Paket bulan	8000 7 106,198,727 2 12 8000	106,198,727	APBD	10000		159,497,880

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Pagu Indikatif Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Outcome (Hasil) : Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha Dokumen	110 40 151,948,952 1 12 110 18291	151,948,952	APBD	110	246,922,919
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal			100	423,803,000	APBD	88	606,900,000
A	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi			100	423,803,000	APBD	100	606,900,000
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Ditinjau dan Dimanfaatkan	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Ditinjau, Ditinjau dan Dimanfaatkan Outcome (Hasil): Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	Orang Rp Paket Bulan Dokumen Persen	1 12 423,803,000 1 12 1 100	423,803,000	APBD	1	606,900,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah			94.57	15,843,690,311	APBD	94.82	19,812,908,602
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			95.68	10,287,036,000	APBD	96.18	13,397,014,152
					71 12 10,287,036,000 1 12 71 95.68	Orang Rp. Paket Bulan Orang/bulan Nilai	APBD APBD APBD	73	13,397,014,152
			Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
C	Administrasi Umum Perangkat daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			86.39	1,435,822,687	APBD	86.89	1,692,127,193
			Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Orang Rp. Paket Bulan Paket Nilai	APBD APBD	1	62,994,425
					1 12 59,994,690 1 12 1 86.39				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Pening	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Paket Nilai	3 12 76,408,953 1 12 3 86,39	76,408,953	APBD	6	80,229,401	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Paket Nilai	3 12 553,999,755 1 12 3 86,39	553,999,755	APBD	4	652,432,058	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Paket Nilai	3 12 99,995,270 1 12 3 86.39	99,995,270	APBD	3	104,995,034	
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	1 57 80,383,000 1 12 1 86.39	80,383,000	APBD	1	84,402,150	

No	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome (Hasil): IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	55 57 565,041,019 1 12 55 86,39	565,041,019	APBD	55	707,074,125	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.39	249,600,000	APBD	86.89	262,080,000	
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit) Outcome (Hasil): IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Jenis Bulan Laporan Nilai	2 12 249,600,000 1 12 2 86,39	249,600,000	APBD	2	262,080,000	

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
E	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan jasa surat menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			97.5	2.523.586.360	APBD	97.75	2.951.651.446
			Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome (Hasil): IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Jenis Bulan Laporan Nilai	1 12 5,000,000 1 12 1 97.5	5,000,000	APBD	1	10,500,000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	650,000,000	APBD	3	763.536.690
			Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	12 650,000,000 1 12 3 97.5				

No	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil): IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	6 13 1,868,586,360 1 12 6 97.5	1,868,586,360	APBD	6	2,177,614,756	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,71	1,347,645,264	APBD	94.46	1,510,035,811	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya Outcome (Hasil): IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Unit Nilai	28 12 822,677,164 2 12 28 94,71	822,677,164	APBD	28	863,811,022	

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Outcome (Hasil): IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	94 12 364,968,100 1 12 94 94.71	364,968,100	APBD	96	383,216,505	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Input: 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome (Hasil): IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	1 12 160,000,000 1 12 1 94.71	160,000,000	APBD	1	263,008,284	
TOTAL							18,749,639,000			24,687,908,602

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

Nama OPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting (8)
			Satuan (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	215,000,000	APBD	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	100	215,000,000	APBD	
2..18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	140,000,000	APBD	
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75,000,000	APBD	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi	%	15.21	912,392,310	APBD	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi	Investor	13088	912,392,310	APBD	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	912,392,310	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya	%	100	343,303,000	APBD	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	360	343,303,000	APBD	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4	110,248,000	APBD	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	150	153,500,000	APBD	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kematuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan	Kegiatan Usaha	16	79,555,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97.82	1,011,450,379	APBD	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Dokumen	18291	1,011,450,379	APBD	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	13153	753,302,700	APBD	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	8000	106,198,727	APBD	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	110	151,948,952	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Nilai	100	423,803,000	APBD	
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	Nilai	100	423,803,000	APBD	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	423,803,000	APBD	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	94.57	15,843,690,311	APBD	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	95.68	10,287,036,000	APBD	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71	10,287,036,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39	1,435,822,687	APBD	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	59,994,690	APBD	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	76,408,953	APBD	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	553,999,755	APBD	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	99,995,270	APBD	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	80,383,000	APBD	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	565,041,019	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	86.39	249,600,000	APBD	
2.18.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	Unit	2	249,600,000	APBD	
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	97.5	2,523,586,360	APBD	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	650,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1,868,586,360	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	94.71	1,347,645,264	APBD	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	822,677,164	APBD	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	364,968,100	APBD	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	160,000,000	APBD	
TOTAL					18,749,639,000		

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagai salah satu pengampu kewenangan bidang perizinan di Kota Balikpapan mengajukan beberapa inovasi yang nantinya diharapkan dapat terus meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Inovasi tersebut antara lain adalah:

1. Desk Investasi (Pelibatan Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha di Kota Balikpapan)
2. Bimbingan Teknis kepada seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dan Aparatur.

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Balikpapan, 14 Juli 2025
Kepala DPMP1SR Kota Balikpapan



HASBULLAH HELMI